

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Untuk saat ini, penulis masih belum menemukan penelitian tentang pemberlakuan bea masuk *anti-dumping* terhadap ekspor wine Australia oleh China secara mendetail. Pada bab II, penulis mencoba menjabarkan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam memulai penelitian demi melengkapi agar penelitian ini menjadi lebih baik.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya merupakan salah satu acuan yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya kajian teori yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak mendapatkan penelitian dengan judul dan tema yang sama seperti judul dari penelitian ini. Namun penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai contoh referensi dalam melengkapi bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berupa jurnal ilmiah dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Nancy Setiawati Silalahi (2010) jurnal yang dipublikasikan mengenai *Implementasi Ketentuan Anti-Dumping: Studi Kasus Tuduhan Indonesia Versus Turki Dan India Versus Indonesia* yang beralmamater di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Peneliti menjelaskan Dumping sebagai

persaingan internasional dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual dibawah dengan harga pasar (*less than normal value*) dan merupakan hal yang sering terjadi dalam perdagangan internasional. Menurut peneliti, yang berdasarkan dalam Bab IV UU No. 10 Tahun 1995 yaitu mengenai BMAD dan BMI (*Bea Masuk Imbalan*) dan Pasal 18 UU No. 10 Tahun 1995 tentang BMAD akan dikenakan pada barang impor dalam hal :

A. Harga produk ekspor dari barang lebih rendah dari nilai nominal

B. Impor barang:

- Mengakibatkan kerugian industry domestic yang mana memproduksi barang sejenis
- Akan mengakibatkan kerugian terhadap industri domestik
- Menghambat perkembangan industri barang sejenis dalam pasar domestik.²⁶

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh saudara Habibi Fahmi (2018) mengenai Faktor-Faktor yang mendasari Australia menyetujui perjanjian FTA dengan China pada tahun 2015. Dalam penelitiannya penulis menjabarkan bagaimana keputusan Australia untuk menandatangani ChAFTA, dengan jelas dijabarkan keputusan tersebut sebagai bentuk implementasi kepentingan nasional dengan pilihan rasional (*rational choice*) dan kekuatan (*power*) yang merupakan salah satu unsur utama sebagai penentu Australia dalam menyetujui kesepakatan dengan China. Pilihan rasional adalah proses mengambil sebuah keputusan yang dilakukan oleh negara

²⁶ Nancy Setiawati Silalahi, “Implementasi Ketentuan Anti-Dumping: Studi Kasus Tuduhan Indonesia Versus Turki dan India Versus Indonesia” <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20325689-S24832-Nancy%20Setiawati%20Silalahi.pdf> Diakses 22 November 2021.

sebagai aktor tunggal. Dengan didasari perhitungan *cost-benefit*, dengan melihat kerugian dan keuntungan yang akan ditimbulkan jika harus memilih. Menurut Axelrod dan Keohane, disebutkan ada tiga kondisi dimana suatu negara mengharuskan melakukan kerjasama dengan didasari dengan:

- A. *Mutual of Interest* adalah keadaan yang dimana negara-negara dari seluruh dunia akan melakukan kerjasama demi mendapatkan tujuan dari kepentingan nasional.
- B. *Shadow of future* adalah sebuah ekspektasi yang timbul dimasa depan jika melakukan kerjasama. Dapat dikatakan kerjasama merupakan bentuk lain dari kepentingan nasional dalam jangka panjang, peraturan yang berlaku hingga saling mendapatkan informasi, dan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.²⁷
- C. *The numbers of players* adalah membentuk dari kerjasama yang berdasarkan ada atau tidaknya peran aktor negara. Metode kerjasama ini berbentuk organisasi atau lembaga internasional. Sehingga peran dari aktor suatu negara akan menghasilkan lembaga internasional dan akan menghasilkan kepentingan baru atas dasar kesepakatan lembaga.²⁸ Proses akhir yang diambil Australia akhirnya menandatangani ChAFTA merupakan serangkaian integrasi. Melalui kerjasama Australia-China tentunya memberikan dampak positif bagi hubungan kedua negara.²⁹

²⁷ R. Axelrod dan R. Keohane, *World Politics*, (America: The Johns Hopkins University Press, 1985), 226.

²⁸ *Ibid*, 254.

²⁹ Habibi Fahmi, "Faktor-Faktor Yang Mendorong Australia Menyetujui Australia-China Free Trade Agreement (ChAFTA) Tahun 2015", diakses 23 November 2021.

Ketiga, jurnal ilmiah oleh Eka Budiyantri (2017) yang meneliti mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terdampak dari liberalisasi perdagangan. Teori-teori liberalisasi perdagangan dari para pencetus dijabarkan dengan baik dalam jurnal ini. Adanya teori liberalisasi yang berasal dari teori keunggulan komparatif serta teori faktor *endowment* yang dicetuskan oleh David Ricardo yang menjelaskan bahwa dalam naungan perjanjian perdagangan bebas jikalau ada negara yang melakukan perdagangan dan ada satu negara yang tidak efisien dalam pengadaan produksi barang, maka masih dimungkinkan perdagangan akan terus berjalan. Sedangkan negara yang lain dapat mendominasi produksi komoditas dengan menggunakan teori *absolute disadvantage* yang lebih rendah sehingga melakukan impor produk komoditas dengan *absolute disadvantage* yang lebih besar.³⁰ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Budiyantri mengemukakan globalisasi yang mendorong suatu negara dalam menerapkan kebijakan-kebijakan dalam liberalisasi perdagangan. Perdebatan dalam kebijakan liberalisasi perdagangan menjadi upaya demi meningkatkan efisiensi kegiatan perdagangan. Liberalisasi perdagangan juga menjadi tantangan dalam mencapai tujuan dari kepentingan nasional.

Berdasarkan penjelasan studi pustaka diatas, dalam penelitian ini penulis akan mencoba meneliti akibat dari penerapan bea masuk yang diterapkan China terhadap sektor ekspor wine asal Australia. Penulis mempelajari bahwa penerapan BMAD merupakan langkah awal pemerintah China untuk melindungi kepentingan

³⁰ D. Salvatore, *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Impor-Ekspor Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 4.

nasionalnya dalam sektor wine. Rencana penelitian penulis setelah mengumpul data dari penelitian sebelumnya ialah akan memfokuskan diri kepada bagaimana dampak yang dirasakan oleh pemerintah Australia dan penulis akan meneliti proses rencana selanjutnya yang akan dilakukan Australia selama masa periode BMAD.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep Pemikiran

Secara harfiah, ilmu hubungan internasional adalah interaksi/ hubungan yang terjadi antar negara satu sama dengan yang lain. Dalam buku berjudul "*Ilmu Hubungan internasional*": *Disiplin & Metodologi* dibantu dikutip oleh Anak Agung Banyu. P bersama Yayan Mochamad. Y mendeskripsikan bahwa:

*"Hubungan internasional sebagai studi yang mempelajari interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, pemerintahan suatu negara, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestic serta individu-individu. Tujuan dari studi hubungan internasional adalah mempelajari fenomena internasional yaitu perilaku antar para aktor negara maupun non-negara dalam arena transaksi internasional. Fenomena ini bisa berwujud pembentukan kelompok aliansi, kerjasama, perang dan konflik serta interaksi dalam organisasi internasional"*³¹

Berpedoman dengan prinsip-prinsip ilmu hubungan internasional, penulis memulai penelitian ini dengan menggunakan konsep BMAD dan teori kepentingan nasional. Kedua pendekatan ini dipilih sebagai *grand theory* karena penulis percaya dengan menggunakan kedua pendekatan ini mampu menjawab hipotesis awal dari

³¹ Anak Agung Banyu P, Yayan Mochamad Y. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

pembelakukan BMAD yang ditujukan untuk Australia dalam sektor agrikultur dalam komoditas wine.

2.2.1 Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional berasal dari prinsip “untuk memenuhi” kebutuhan suatu negara. Kepentingan yang bersifat nasional ini dapat dilihat dari kondisi internalnya baik dari aspek utama seperti ekonomi, militer, politik, militer dan budaya sosial. Kepentingan akan adanya “*power*” yang diinginkan dihasilkan maka negara mampu memberikan dampak secara nyata terhadap pertimbangan kebijakan negara agar mendapatkan pengakuan dunia. Peran negara akan memfasilitasi sebagai dari kepentingan nasional tidak dapat dipungkiri akan menjadi perspektif dalam masyarakat global sebagai negara yang menjalin hubungan dengan disertai kebijakan luar negeri. Maka dengan ini, kepentingan nasional dengan konseptual dipergunakan untuk mendeskripsikan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Seorang ahli bernama Kindleberger menjabarkan kepentingan nasional sebagai berikut:

“..Hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan (sumber daya alam) yang dimiliki tiap-tiap negara dalam memproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih masing-masing negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai dengan kepentingan nasional..”³²

Menurut Mochtar Mas’ood mendeskripsikan kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan ini dapat dilihat dari kepentingan

³² Paul H. Lindert, Charles P. Kindleberger. *Ekonomi Internasional*. (Jakarta: Erlangga. 2011), 18.

suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Hal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat menghasilkan kemampuan akan nilai kebutuhan maupun keinginan pribadi yang sejalan dengan usaha menyeimbangkan akan kebutuhan maupun keinginan pihak lain. Teori ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya.³³ Kemampuan yang menjadi batasan didukung dari Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu faktor Australia melakukan banding terhadap China adalah untuk mempertahankan eksistensinya di China dan menjaga agar wine Australia tetap bisa memasuki market China tanpa harus mengalami hambatan yang berarti seperti yang sudah disepakati dalam ChAFTA dan juga demi mempertahankan laju ekspor anggur wine. Sudah dijelaskan pada latar belakang, dapat dilihat bagaimana Australia sangat bergantung terhadap China sebagai pasar tujuan terdekat dibandingkan Australia harus mengekspor wine ke Eropa dan Amerika Serikat yang akan menambah tarif ekspor.

2.2.2 Konsep Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)

Dumping ialah suatu kebijakan bersifat diskriminasi harga secara internasional (*International price discrimination*) yang telah dilakukan dengan menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah (*less than the normal value*) dibandingkan dengan harga pasaran

³³ Mochtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2011), 35.

produk domestik.³⁴ Pengenaan bea dumping berdasarkan GATT tentang BMAD dan BMI (*Anti-Dumping and Countervailing Duties*). Berdasarkan Pasal VI GATT pada tahun 1947 yang menjelaskan pemberian hak kepada setiap negara untuk menetapkan kebijakan anti-dumping.³⁵

Lebih terperinci, ketentuan mengenai dumping diuraikan dan diperbarui pada Putaran Paraguay tahun 1994. Hasil persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994 menjabarkan bahwa pengenaan BMAD akan diterapkan sebagaimana keadaan yang diatur Pasal VI GATT tahun 1994 dengan didasari dengan prosedur penyelidikan dalam pelaksanaan dalam ketentuan perjanjian. Ketentuan dasar anti-dumping menetapkan bagaimana prosedur dasar pelaksanaan investigasi dumping serta pengenaan BMAD untuk menutupi kerugian (*injury*).³⁶

Kebijakan penetapan BMAD terhadap wine asal Australia berdasarkan investigasi yang dilakukan pemerintah China selama 12 bulan. Aturan WTO mengenai anti-dumping tidak ada pelarangan yang mengharuskan anggota WTO untuk melakukan dumping. Sebaliknya WTO hanya mengizinkan fleksibilitas bagi negara-negara anggota untuk menggunakan anti-dumping untuk mereduksi efek kerugian dari tindakan dumping dengan syarat tindakan tersebut dapat disesuaikan dengan aturan substantif dan prosedural yang akan dikoordinasikan dalam perjanjian Anti-Dumping WTO. Untuk menerapkan tindakan anti-dumping,

³⁴ Paul R. Krugmen & Maurice Obstfeld (2003), *International Economics: Theory and Policy*, Sixth Edition, World Student Series, New York.

³⁵ Alan. C Swan dan John F. Murphy. *Cases and Material on The regulation of International Business and Economic Relations*. New York: Matthew Bender & Co. 1991. Hal. 194.

³⁶ S. Silalahi, Nancy. *Implementasi Ketentuan Anti-Dumping: Studi Kasus Tuduhan Indonesia vs Turki dan India*. Universitas Indonesia. 2010. Hal 14.

otoritas negara juga harus melakukan investigasi yang menetapkan bahwa dumping telah menyebabkan kerugian material pada industri domestik.

Menurut Rasmussen, perhitungan indeks total keterkaitan yakni meliputi indeks *total backward linkage* (total keterkaitan ke arah belakang) yang dideskripsikan sebagai penggabungan total keterkaitan ke arah belakang pada sektor yang menunjukkan hubungan keterkaitan terhadap pengaruh yang disebabkan adanya satu permintaan akhir pada sektor serta *total forward linkage* (total keterkaitan ke arah depan). Penggabungan indeks total keterkaitan ke belakang suatu sektor industri menunjukkan adanya keterkaitan mengenai pengaruh yang diakibatkan oleh satu unit permintaan pada tahap akhir pada sektor terkait hingga total dari permintaan tersebut akan terkumpul menjadi total pembelian dari semua sektor dalam perekonomian suatu negara.³⁷

Pemerintah Australia menganalisis penerapan BMAD dengan menggunakan dua metode utama yang dapat digunakan dalam menganalisis kontribusi ekonomi yang diberikan oleh sektor wine yakni;

1. Analisis *Input-Output* (I-O) dipergunakan dalam pengembangan eksistensi industri wine baik secara langsung dan tidak langsung dengan meneliti keterkaitan antar sektor produksi dalam sistem perekonomian. Indeks analisis yang dipergunakan untuk memahami keterkaitan dalam kegiatan ekonomi.

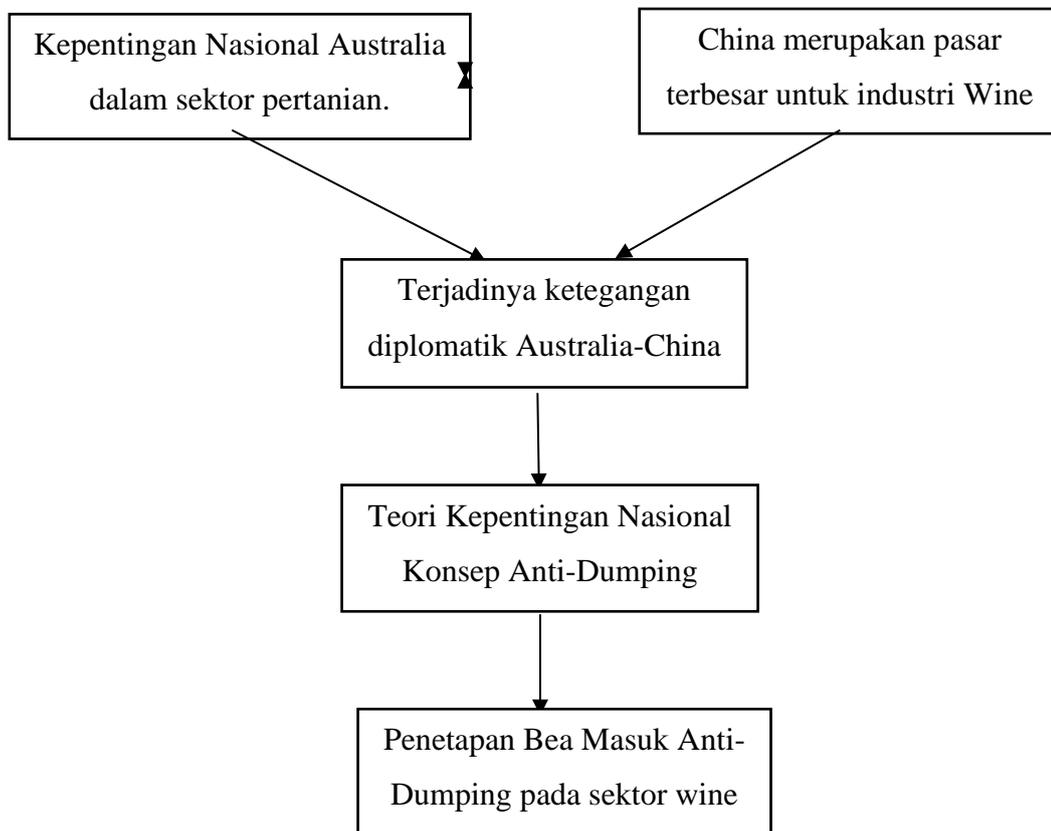
³⁷ Oktavia Pangaribuan, *Penerapan Model Input-Output*. (Jakarta: Kemenkeu, 2014)

2. Analisis *Computable General Equilibrium* (CGE) yang menilai aspek-aspek dari perubahan dan ancaman terhadap kegiatan ekonomi. Sebagai contoh ekspansi dan kontraksi atau aktivitas baru.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penulis membuat kerangka pemikiran sebagai pedoman rancangan dari penelitian ini. Kerangka pemikiran ini menjadi garis besar bagaimana penulis melakukan penelitian berdasarkan materi ajar selama perkuliahan sehingga penulis mampu menjawab rumusan masalah dan pokok pertanyaan pada bagian sebelumnya. Berikut gambaran kerangka pemikiran penulis.

Bagan 1. Kerangka Penelitian



Ketegangan hubungan bilateral kedua negara telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Hubungan dagang yang berjalan dengan baik dalam satu dekade terakhir mulai mengalami perpecahan. Seperti yang diketahui ketika perusahaan Huawei yang merupakan perusahaan penyedia alat telekomunikasi berbasis di China mendapat larangan masuk oleh pemerintah Australia. Dalam pernyataan resmi melalui website resmi, Huawei menyatakan bahwa merupakan perusahaan swasta yang sepenuhnya dimiliki oleh karyawan tanpa ada pihak ketiga yang memiliki campur tangan dengan pemerintah China.

Alasan pemerintah Australia untuk pelarangan ini sangat beralasan. Pendiri dari Huawei, Zhengfei Ren memiliki latar belakang sebagai anggota KOPRS Teknik Militer China sekaligus pernah menjabat sebagai Direktur Akademisi Teknik Informatika dari *People's Liberation Army* (PLA) yang merupakan Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat China sebelum membangun perusahaan Huawei. Hal ini yang membuat pemerintah Australia melakukan hal sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat juga menolak perusahaan Huawei untuk masuk ke dalam negara nya dengan alasan kehadiran program telekomunikasi 5G dari Huawei akan mempengaruhi sistem keamanan nasional aliansi barat.

Salah satu faktor China menerapkan BMAD terhadap Australia adalah untuk melindungi industri wine domestik China yang sedang dibangun di beberapa kawasan regional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Wine impor masuk ke China pada awal 1990. Pada tahun 2001, ketika China mulai bergabung kembali ke WTO membuat dominasi jumlah wine impor yang beredar di pasar domestik. Hal

ini membuat para pelaku wine lokal memulai sadar akan potensi besar dari wine untuk dijadikan industri dalam negeri.

Pemerintah China mendukung potensi ini dengan mengembangkan kawasan wine di beberapa wilayah. Wilayah yang dialokasikan sebagai lahan pengembangan wine berada di Kawasan Ningxia dengan luas lahan sekitar 38.000 hektar, wilayah Xinjiang 33.500 hektar dan Shandong seluas 19.500 hektar dengan total lahan seluas 855,000 hektar. Bantuan yang diberikan pemerintah China tidak hanya pengadaan lahan untuk menanam anggur, namun juga lahan untuk pengolahan kilang-kilang penyimpanan wine, infrastruktur dan pemasaran untuk wilayah rekreasi wine.³⁸

Menurut Pusat Penelitian Ekonomi Wine dari Universitas Adelaide, China memperluas pasar produksi anggur rata-rata sebesar 10 persen dalam 3 tahun pada tahun 2014. Sehingga menempatkan posisi China ke dalam top ranking 10 besar sebagai negara produsen wine dengan menambah jumlah produksi mencapai 830 juta liter pada tahun 2019.³⁹ Organisasi Internasional Vine dan Wine (OIV) menjelaskan produksi wine China masih memiliki structural seperti kondisi iklim China yang bervariasi, teknologi yang belum memadai dan hasil produksi yang masih rendah sehingga membuat produksi wine china masih dinilai kurang untuk berkompetisi dengan negara-negara pengekspor wine lain.⁴⁰

³⁸ Club Oenologique, *Chinese Wine Explained*, <https://cluboenologique.com/story/chinese-wine-explained/> diakses 20 Juni 2022

³⁹ Wine Australia, *The Wine Australia Annual Report 2019-2020*, (Universitas Adelaide, 2020)

⁴⁰ OIV. *State of Vitiviniculture*. <https://www.oiv.int/en/technical-standards-and-documents/statistical-analysis/state-of-vitiviniculture> Diakses juni 2022

OIV memperkirakan penurunan 3,3% dalam konsumsi wine di China pada tahun 2019 sampai dengan 1,8 liter wine yang merupakan penurunan kedua dalam kurun waktu dua tahun terakhir.⁴¹ Penurunan pada wine terjadi dikarenakan produksi wine dalam negeri relatif stabil dibandingkan dengan impor wine. Sebagian besar penurunan terjadi pada tahun 2020 dikarenakan pandemic COVID-19, berkurangnya permintaan dan gangguan pendistribusian wine. Meskipun begitu, wine impor dianggap lebih unggul dalam kualitas dan rasa dibandingkan dengan wine domestik.

Berdasarkan pemahaman diatas, penulis mencoba menarik titik terang dari ketegangan hubungan bilateral Canberra-Beijing. Penulis beranggapan bahwa BMAD yang diterapkan secara langsung masih memiliki keterkaitan dengan ketegangan hubungan diplomatik yang terjadi. Perjanjian hubungan dagang ChAFTA juga terpengaruh dengan kejadian ini serta mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional Australia. Menurut Teori Kepentingan Nasional, hal yang dilakukan oleh Australia dan China merupakan elemen utama teori ini.

Menurut pandangan kaum liberalis, penghapusan bentuk-bentuk hambatan dan intervensi menjadikan pengaplikasian paham liberalisasi dalam perdagangan internasional akan menimbulkan peningkatan permintaan ekspor dan impor jadi lebih besar sehingga mampu menambah nilai tambah yang didapat. Kondisi ini selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara. Untuk mendapatkan manfaat atau *profit* dibukanya perdagangan dalam skala umum yang

⁴¹ *Ibid.*

digunakan dalam kesejahteraan. Analisis perubahan kesejahteraan rakyat akibat perdagangan hingga penerapan instrumen liberalisasi terhadap perdagangan mampu dilakukan hingga penggunaan konsep surplus konsumen dan surplus produsen (*Consumer Surplus and Producer Surplus*).

Berdasarkan tujuan adanya kebijakan tarif dapat dijabarkan sebagai:

1. Tarif Proteksi merupakan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk menghindari *over capacity* suatu barang tertentu.
2. Tarif Revenue yakni pengenaan tarif bea masuk yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara.

Terkait dengan tujuan pengadaaan tarif, menurut fungsi diberlakukannya tarif adalah untuk mengendalikan dan mengatur perlindungan terhadap ekonomi perdagangan dalam negeri (fungsi regulen) dan juga sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan negara (fungsi budgeter) serta fungsi pemerataan, yang dimana fungsi ini diterapkan sebagai pendistribusian pendapatan nasional. Selanjutnya, menurut pendapat seorang ahli ekonomi, Lindert dan Kindleberger (1978) yang menegaskan adanya pembatasan kuota sebagai “*a limit on the total quantity of import will allowed into a country every year*”.⁴²

Dalam hal ini penulis, menarik kesimpulan dari penjabaran diatas yakni adanya kuota tarif merupakan hambatan non-tarif yang sering dipergunakan untuk memproteksi suatu negara dengan mengurangi laju masuknya impor terhadap jasa dan barang. Penerapan kebijakan kuota impor berlandaskan beberapa alasan yaitu:

⁴² G.S. Handono, H.P.S Rachma dan S.H. Suhartini. *Liberalisasi perdagangan: Teori, Dampak dan perspektif Ketahanan Pangan*. 2004 Forum penelitian Argo Ekonomi. Vol. 22 Hal: 75.

- Kuota dijadikan alasan sebagai adanya kenaikan pengeluaran impor yang diakibatkan adanya persaingan global antar negara yang semakin menurun.
- Kebijakan penetapan kuota akan memberi peluang dan kekuatan terhadap sistem birokrasi suatu pemerintah.